

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan merupakan instrumen penting dalam suatu perusahaan, kondisi perusahaan secara *financial* dapat tercermin dalam laporan keuangan. Laporan keuangan menjadi salah satu bentuk alat komunikasi perusahaan mengenai data atau aktivitas operasional perusahaan kepada para pengguna informasi keuangan (Ferica et al., 2019).

Tertuang dalam Pedoman Standar Akuntansi (PSAK) No. 1 tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan tersebut dalam pembuatan keputusan ekonomi. Dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) disebutkan bahwa pemakai laporan keuangan meliputi investor, karyawan, pemerintah serta lembaga keuangan, dan masyarakat.

Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada entitas. Hal ini menjadi dorongan perusahaan untuk menyajikan laporan keuangan dengan sebaik mungkin. Oleh sebab itu, disamping memenuhi unsur-unsur kualitatif laporan keuangan juga harus disajikan sesuai dengan ketentuan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK). Standar akuntansi keuangan akan memberikan arahan dan ketetapan dalam penyajian laporan keuangan serta akan mempengaruhi kualitas informasi yang dihasilkan (Santoso & Surenggono, 2018).

Komponen dalam Laporan keuangan yang diterapkan di Indonesia sudah semakin komprehensif untuk meyakinkan *stakeholder* bahwa laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan ketentuan pernyataan standar akuntansi keuangan, maka laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen diaudit oleh akuntan publik. Namun, hasil audit yang dilakukan oleh akuntan publik tidak menjamin sepenuhnya bahwa laporan keuangan bebas dari kecurangan atau penipuan. Terkadang

manajemen memanfaatkan informasi untuk kepentingannya yang dapat mempengaruhi pengguna laporan keuangan sehingga hal tersebut menjadi celah manajemen untuk melakukan kecurangan. Informasi tersebut berupa laporan keuangan perusahaan (Rahmawati, 2017).

Kecurangan (*fraud*) adalah tindakan kejahatan finansial yang paling merugikan, pihak-pihak yang melakukannya memutuskan untuk mencari keuntungan yang ilegal. Kecurangan (*fraud*) didefinisikan sebagai penyalahgunaan jabatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi melalui penyalahgunaan sumber daya atau aset organisasi (Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), 2018).

Menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (2020) yang menyatakan bahwa terdapat 3 (tiga) skema tindakan kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dan karyawan di dalam perusahaan sebagai berikut:

“Kategori utama yaitu penyalahgunaan asset dengan 86% kasus yang terjadi, namun menyebabkan kerugian terendah yaitu USD 100.000 per kasus. Kategori ke dua yaitu korupsi berada di tengah-tengah dalam hal kerugian finansial dengan 43% kasus dan menyebabkan kerugian rata-rata sebesar USD 200.000 per kasus. Kategori ketiga yaitu kecurangan laporan keuangan dengan 10% kasus yang terjadi tetapi merupakan tindak kecurangan yang paling merugikan.”

Salah satu bentuk *fraud* yang terjadi dalam perusahaan adalah kecurangan laporan keuangan (*financial statement fraud*). Kecurangan laporan keuangan merupakan suatu usaha yang dilakukan dengan sengaja oleh perusahaan untuk mengecoh dan menyesatkan para pengguna laporan keuangan, terutama investor dan kreditor, dengan menyajikan dan merekayasa nilai material dari laporan keuangan (Sihombing, 2014).

Kecurangan dalam laporan keuangan dengan menyajikan laporan keuangan yang di dalamnya melaporkan aset dan pendapatan bersih lebih besar dari yang sebenarnya (*overstatement*) tujuannya untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan saham yang akan menarik investor untuk menanamkan sahamnya. Di sisi lain, kecurangan laporan keuangan dilakukan untuk menekan laba dengan cara menyajikan laporan keuangan dengan mengurangi laba dari yang sebenarnya (*understatement*) dalam rangka menghindari atau memperkecil pengenaan pajak penghasilan badan.

Menurut (Hariri et al., 2017) menyatakan bahwa ada beberapa praktik yang bisa dilakukan untuk menaikkan atau menurunkan aset atau laba perusahaan adalah sebagai berikut:

- a. Kecurangan dalam penilaian aset seperti penetapan piutang dan persediaan yang lebih tinggi, manipulasi harga pembelian aset tetap dan kapitalisasi persediaan yang tidak sesuai.
- b. Mencatat transaksi penjualan fiktif yang berakibat pada *overstatement* aset dan pendapatan.
- c. Melakukan *understatement* atas kewajiban dan beban seperti sengaja tidak mencatat atau menyembuyikan transaksi terkait beban dan kewajiban.
- d. Menyalahgunakan perbedaan waktu atau periode akuntansi misalnya dengan melakukan pengakuan pendapatan lebih cepat dari yang seharusnya atau menunda pengakuan beban.
- e. Kecurangan dalam pengungkapan informasi pada laporan keuangan, seperti sengaja tidak memberikan informasi atau memberikan informasi yang meyesatkan kepada pemakai laporan keuangan.

Banyak pihak yang merasa dirugikan karena mendapatkan informasi yang tidak semestinya, kerugian mungkin lebih dirasakan oleh para investor karena akan berdampak pada terjadinya kegagalan mendapatkan *return* dari aktivitas investasi yang dilakukan. Praktik kecurangan laporan keuangan dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk menutupi kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya dan bertujuan untuk menjaga nilai saham. *Fraud* dapat merusak hubungan kepercayaan antara manajemen dan investor, tidak hanya itu *fraud* juga dapat mengotori nilai-nilai dari akuntansi itu sendiri. Manajemen tentu akan menjadi pihak yang paling dituntut pertanggungjawabannya atas timbulnya situasi yang merugikan banyak pihak ini. Proses audit yang dilakukan pada periode tersebut tentunya akan dipertanyakan juga, auditor yang seharusnya mampu memberikan keyakinan atas materialitas informasi dapat gagal mendeteksi adanya kecurangan pada laporan keuangan. Laporan keuangan dapat menjadi dasar fundamental bagi penggunaannya untuk membuat suatu keputusan yang berkaitan dengan keuangan. Perihal tersebut, laporan keuangan harus

mengandung informasi atau data yang bermanfaat bagi penggunanya. Data yang bermanfaat adalah data yang memenuhi standar relevan, andal, tepat waktu, lengkap, dapat diverifikasi, mudah dipahami, dan dapat diakses (Ghozali & Ratmono, 2013).

Fenomena *fraud* terjadi di Indonesia yang merusak hubungan kepercayaan antara manajemen dan investor adalah kasus rekayasa laporan keuangan PT. Garuda Indonesia tbk tahun buku 2018. Menurut Saragih (2019) dalam cnc Indonesia, PT Garuda membukukan laba bersih sebesar US\$ 809,85 ribu atau setara Rp 11,33 miliar angka tersebut melonjak tajam dibanding tahun 2017 yang menderita rugi USD 216,5 juta. Laba itu berkat melambungnya pendapatan usaha lainnya yang totalnya mencapai US\$ 306,88 juta. Ternyata terdapat dua komisaris yang enggan menandatangani laporan keuangan itu. Mereka merasa keberatan dengan pengakuan pendapatan atas transaksi Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Layanan Konektivitas dalam Penerbangan, antara PT Mahata Aero Teknologi dan PT Citilink Indonesia. Pernyataan itu dianggap tidak sesuai dengan kaidah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 23. Sebab manajemen Garuda Indonesia mengakui pendapatan dari Mahata sebesar US\$ 239.940.00 yang diantaranya sebesar US\$ 28.000.000 merupakan bagian dari bagi hasil yang didapat dari PT Sriwijaya Air. Padahal uang itu masih dalam bentuk piutang, namun diakui perusahaan masuk dalam pendapatan. Pemegang saham terbesar yakni pemerintah berpandangan sebaliknya, mereka menyetujui laporan keuangan tersebut. Menurut ekonom *Institute for Development of Economics and Finance* (INDEF), Enny Sri Hartiati mengemukakan bahwa apa yang dilakukan PT Garuda Indonesia termasuk manipulasi penyajian laporan keuangan. Jika terungkap maka akan merusak citra perusahaan. Kasus ini juga menyeret akuntan publik yang mengaudit atas laporan keuangan PT. Garuda Indonesia yaitu KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang dan Rekan. Atas kasus ini menteri keuangan Sri Mulyani menjatuhkan sanksi berupa pembekuan izin akuntan publik dan kantor akuntan publik selama 12 bulan (Kemenkeu, 2019).

Kasus *fraud* juga ditemukan pada PT Asuransi Jiwasraya yang masih menjadi sorotan masyarakat. Dikutip dari Makki (2020) dalam CNN Indonesia, Asuransi jiwa

tertua di Indonesia itu mengalami tekanan likuiditas sehingga ekuitas perseroan tercatat negatif Rp 23,92 triliun pada September 2019. Ternyata kasus Jiwasraya merupakan puncak gunung es yang baru mencuat, permasalahan Jiwasraya sudah terjadi sejak tahun 2000-an. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini *disclaimer* (tidak menyatakan pendapat) untuk lampiran keuangan tahun 2006-2007 lantaran penyajian informasi cadangan tidak dapat diyakini kebenarannya. Defisit perseroan semakin lebar, yakni Rp 5,7 triliun pada 2008 dan Rp 6,3 triliun pada 2009. Jiwasraya melanjutkan skema reasuransi dan mencatatkan surplus sebesar Rp 1,3 triliun pada akhir 2011. Namun, Kepala Biro Keasuransian menyatakan metode reasuransi merupakan penyelesaian sementara. Sebab, keuntungan operasi dari reasuransi hanya mencerminkan keuntungan semu dan tidak memiliki keuntungan ekonomis. Laporan keuangan 2011 disebutkan tidak mencerminkan angka yang wajar. Pada 2107 kondisi keuangan Jiwasraya membaik, laporan keuangan Jiwasraya positif dengan raihan pendapatan premi dari produk JS Saving Plan mencapai Rp 21 triliun dan meraup laba Rp 2,4 triliun atau 37,64% dari tahun 2016. Direktur utama Jiwasraya dan direktur keuangan Jiwasraya dicopot pada tahun 2018 dari jabatan saat itu pula nasabah mulai mencairkan JS Saving Plan karena mencium kebobrokan direksi lama. Dibawah kepemimpinan direksi baru melaporkan kejanggalan laporan keuangan kepada kementerian BUMN. Indikasi kejanggalan itu betul karena hasil audit Kantor akuntan Publik (KAP) PricewaterhouseCooper (PwC) atas laporan keuangan 2017 mengoreksi laporan keuangan interim dari laba sebesar Rp 2,4 triliun menjadi hanya Rp 428 miliar. Pada tahun 2018 masalah tekanan likuiditas Jiwasraya mulai tercium publik, perseroan mengumumkan tidak dapat membayar klaim polis jatuh tempo nasabah JS Saving Plan sebesar Rp 802 miliar. Jiwasraya membutuhkan dana sebesar Rp 32,89 triliun untuk memenuhi rasio solvabilitas (RBC) 120%. Tak hanya itu asset perusahaan tercatat hanya sebesar Rp 23,26 triliun sedangkan kewajibannya mencapai Rp 50,5 triliun. Akibatnya, ekuitas Jiwasraya negatif sebesar Rp 27,24 triliun. Liabilitas dari produk JS saving plan yang bermasalah tercatat sebesar Rp 15,75 triliun. Pada tahun 2019 Kementerian BUMN mengaku melaporkan indikasi kecurangan pada Jiwasraya ke Kejaksaan Agung

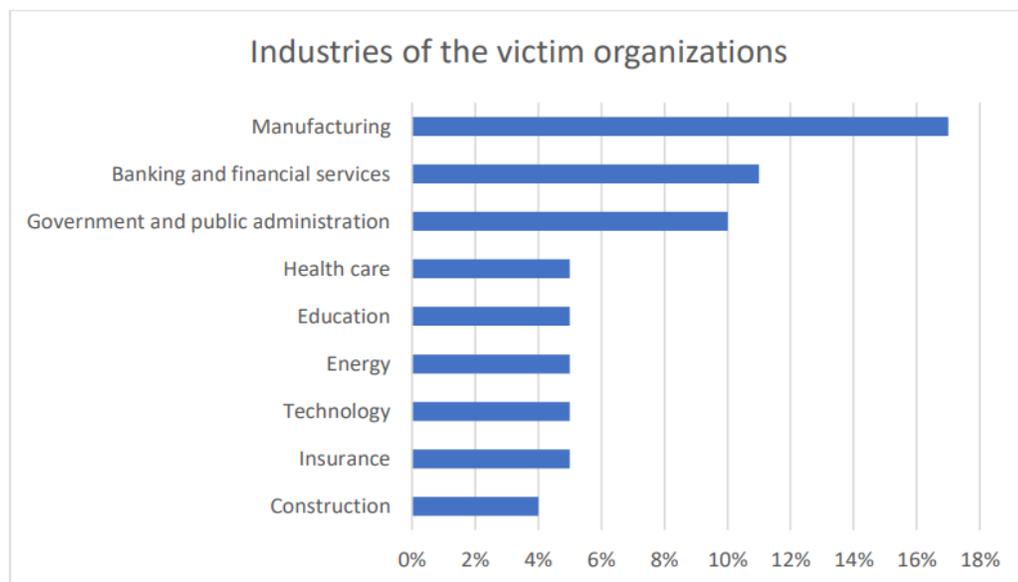
(Kejagung) karena pemerintah melihat secara rinci laporan keuangan perusahaan yang dinilai tidak transparan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengumumkan resmi terkait skandal Jiwasraya. Salah satunya laba perseroan sejak 2006 disebut semu karena melakukan rekayasa akuntansi (*window dressing*). Hasil pemeriksaan BPK akan menjadi dasar bagi Kejagung mengambil keutusan terhadap orang-orang yang bertanggung jawab atas kondisi Jiwasraya.

Kasus kecurangan juga dialami oleh PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA). Menurut Prabowo (2020) dalam kontan.co.id, pada tahun 2018 terdapat perselisihan internal manajemen Tiga Pilar Sejahtera Food. Pada akhirnya, perusahaan memutuskan untuk membentuk manajemen baru. Manajemen baru menunjuk auditor Ernest & Young (E&Y) untuk memeriksa laporan keuangan sebelumnya ditemukan penggelembungan dana oleh manajemen lama, Joko Mogoginta dan Budhi Istanti Suwito. Menurut Sidik (2021) dalam CNBC Indonesia, memaparkan Tiga Pilar Sejahtera Food terbukti telah melakukan manipulasi laporan keuangan tahun 2017 di mana auditor menemukan adanya penggelembungan dana sebesar Rp 4 Triliun pada akun piutang usaha, persediaan dan asset tetap perusahaan. Serta, penggelembungan dana Rp 622 miliar pada pos penjualan dan EBITDA sebesar Rp 329 miliar. Selain itu, terdapat dugaan aliran dana Rp 1,78 triliun dengan berbagai skema pada grup Tiga Pilar Sejahtera Food kepada pihak yang diduga memiliki afiliasi dengan manajemen lama. Otoritas jasa keuangan (OJK) memberikan sanksi berupa suspensi transaksi saham serta potensi penghapusan pencatatan (*delisting*) kepada PT tiga pilar sejahtera food Tbk (AISA). Sementara itu, mantan direktur Tiga Pilar Sejahtera Food Joko Mogoginta dan Budhi Istanti Suwinto resmi ditahan pada 14 Februari 2020 dengan hukuman paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 10 miliar.

Kasus-kasus yang terjadi menunjukkan bahwa penyajian data yang tidak sesuai dengan kondisi aktual menyebabkan informasi yang ditampilkan dalam laporan keuangan tidak relevan untuk dijadikan bahan pengambilan keputusan. Kecurangan laporan keuangan terjadi karena tekanan dari pihak eksternal maupun internal. Kecurangan laporan keuangan cenderung terjadi dalam kasus manajemen

laba perusahaan bahkan sampai pada titik di mana manajemen puncak terlibat. Kecurangan juga dapat terjadi karena akuntan publik gagal mendeteksi risiko penipuan (Harman & Bernawati, 2020).

Maraknya kasus kecurangan laporan keuangan diberbagai sektor industri terutama pada sektor manufaktur yang telah diuraikan di atas, hal ini sesuai dengan survey yang telah dilakukan oleh *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) tahun 2018.



Sumber: *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) 2018*

Gambar 1. 1 Industries of The Victim Organizations

Berdasarkan survey ACFE tahun 2018 menunjukkan bahwa sektor manufaktur merupakan sektor tertinggi yang melakukan kecurangan laporan keuangan yaitu sebesar 17% dengan 38 kasus selama tahun 2018. Hal tersebut terbukti dengan banyaknya kasus kecurangan pada sektor manufaktur yang terjadi beberapa tahun kebelakang.

Munculnya berbagai kasus kecurangan laporan keuangan yang dilakukan perusahaan diperlukan perencanaan pengendalian *fraud* yang mampu menjadi indikator kuat terjadinya *fraud* ketika dilakukan deteksi tindakan *fraud* berdasarkan laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan (Sari & Nugroho, 2020).

Faktor tekanan dari para eksekutif perusahaan agar memberikan informasi palsu untuk mencapai target perusahaan. Faktor kesempatan karena mempunyai kedudukan jabatan di perusahaan maka para eksekutif perusahaan dan para pegawai secara langsung terlibat dalam memanipulasi data laporan keuangan. Faktor rasionalisasi menganggap bahwa tindakan yang dilakukan para eksekutif maupun pegawai perusahaan adalah tindakan yang benar demi kepentingan perusahaan. Faktor kemampuan dari direksi yang mengkoordinasikan bawahannya untuk melakukan manipulasi data laporan keuangan. Akibat dari keserakahan direksi untuk menggelembungkan nilai aset dan nilai modal yang disetor guna untuk mencapai target perusahaan yang dipimpinya.

Beberapa ahli telah menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi *fraud* dan dibuktikan dalam berbagai model deteksi *fraud* yang diawali oleh Donald R. Cressey (1953), dengan pendekatan mendasar yang disebut *fraud triangle theory* dengan komponen tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Kemudian dikembangkan lagi oleh Wolfe dan Hermanson (2004) menjadi *fraud diamond* yang merupakan penyempurna dari teori sebelumnya dengan mempertimbangkan elemen keempat yaitu kemampuan. Teori terbaru dari ahli ilmu Ekonomi-Akuntansi di Indonesia, Haryono Umar (2020) mengembangkan teori *fraud* yang disebut *fraud star* dengan menambahkan elemen ke lima yaitu integritas. Dengan demikian, unsur-unsur yang ditemukan dalam *fraud star* adalah tekanan, kesempatan, rasionalisasi, kemampuan dan integritas.

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terkait kecurangan laporan keuangan (*financial statement fraud*), masih terdapat inkonsistensi hasil penelitian. Saputra (2017) yang meneliti faktor pengaruh *fraudulent financial reporting* dengan variabel independen yang digunakan ialah *financial stability*, *external pressure*, *institutional ownership*, *change in auditor*, *change in director* dan *external regulatory influence*. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa variabel *financial stability*, *external pressure*, *institutional ownership*, *change in auditor*, *change in director* berpengaruh positif terhadap *fraudulent financial reporting*, sedangkan *external regulatory influence* berpengaruh negatif terhadap *fraudulent financial reporting*.

Penelitian selanjutnya dari Lestari & Henny (2019) yang meneliti pengaruh fraud pentagon terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan perbankan. Variabel yang digunakan yaitu target keuangan, stabilitas keuangan, ketidakefektifan pengawasan, pergantian auditor, pendidikan CEO, frekuensi jumlah foto CEO. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa variabel stabilitas keuangan dan ketidakefektifan pengawasan berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan, sedangkan variabel target keuangan, pergantian auditor, pendidikan CEO, dan frekuensi gambar CEO tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.

Penelitian kecurangan laporan keuangan selanjutnya dilakukan pada badan usaha milik Negara (BUMN) oleh Rusmana & Tanjung (2019) dengan menggunakan variabel stabilitas keuangan, tekanan eksternal, target keuangan, pengawasan yang tidak efektif, pergantian auditor, pergantian direktur, dan gambar CEO. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan eksternal mempengaruhi kecurangan laporan keuangan. Sedangkan variabel stabilitas keuangan, target keuangan, pengawasan yang tidak efektif, pergantian auditor, pergantian direktur, dan gambar CEO tidak terbukti mempengaruhi kecurangan laporan keuangan.

Penelitian pada perusahaan manufaktur juga diteliti oleh Faradiza (2019) dengan menggunakan variabel frekuensi gambar CEO, pergantian direksi, pergantian CEO, stabilitas keuangan, tekanan dari luar, target keuangan, ketidakefektifan pengawasan, sifat industri, pergantian auditor dan total rasio akrual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pergantian direksi, stabilitas keuangan, target keuangan, ketidakefektifan pengawasan, dan sifat industri berpengaruh pada kecurangan laporan keuangan, sedangkan untuk variabel lainnya yaitu frekuensi gambar CEO, tekanan dari luar, pergantian auditor, dan total rasio akrual tidak berpengaruh pada kecurangan laporan keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kecurangan laporan keuangan, menunjukkan hasil penelitian yang masih terdapat inkonsistensi sehingga penelitian mengenai kecurangan laporan keuangan menarik dan masih layak untuk diuji kembali. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini menerapkan *fraud star theory*.

Teori tersebut merupakan teori terbaru yang secara empiris belum banyak diaplikasikan untuk meneliti fenomena *fraud* khususnya di Indonesia. Elemen-elemen dalam *fraud star theory* tidak dapat begitu saja diteliti, diperlukan variabel proksi dalam mengukurnya. Faktor pertama tekanan (*pressure*) diproksikan melalui *financial stability*. Faktor kedua kesempatan (*opportunity*) di proksikan melalui *ineffective monitoring*. Faktor ketiga rasionalisasi diproksikan melalui *change auditor*. Faktor keempat kemampuan (*capability*) diproksikan melalui *change of director*. Salah satu ukuran kualitas laporan adalah pengungkapan (*disclosure*) atas pos-pos atau butir-butir dalam laporan yang masih belum memberikan makna bagi pembaca atau pengguna laporan. Maka dari itu, faktor ke lima kehilangan integritas diproksikan melalui *index of disclosure*. Kelima elemen tersebut diindikasikan dapat menjadi pemicu terjadi peningkatan *fraud* (Umar, 2020). Penelitian ini dilakukan untuk menguji lebih mendalam mengenai kemampuan *fraud star theory* yang dikemukakan oleh Haryono Umar tahun 2020 dan memberikan penjelasan apakah teori tersebut dapat membantu untuk mendeteksi adanya kecenderungan kecurangan (*fraud*) terutama pada kecurangan laporan keuangan.

Perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini difokuskan pada jenis perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) pada tahun 2018 bahwa sektor manufaktur merupakan sektor tertinggi pertama yang melakukan kecurangan, serta banyaknya kasus kecurangan laporan keuangan yang terjadi pada sektor manufaktur dalam beberapa tahun ini.

Dengan uraian yang telah dipaparkan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Fraud Star Dalam Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan (Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2018)”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah tekanan berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan?
2. Apakah peluang berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan?
3. Apakah rasionalisasi berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan?
4. Apakah kemampuan berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan?
5. Apakah integritas berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan?

1.3. Tujuan Penelitian

Dengan melihat rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian untuk mengetahui pengaruh :

1. Tekanan terhadap kecurangan laporan keuangan.
2. Peluang terhadap kecuranga laporan keuangan.
3. Rasionalisasi terhadap kecurnagan laporan keuangan.
4. Kemampuan terhadap kecurangan laporan keuangan.
5. integritas terhadap kecurangan laporan keuangan.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap bahwa penelitian ini mampu memberikan sumbangsih dalam perkembangan ilmu akuntansi. Selain itu, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi pembaca dalam hal faktor-faktor yang mempengaruhi kecurangan (*fraud*) terkhusus terhadap kecurangan laporan keuangan (*financial statement fraud*).

1.4.2. Manfaat Praktisi

Bagi perusahaan yang diteliti, dengan adanya penelitian ini manajemen perusahaan diharapkan dapat mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kecurangan laporan keuangan. Sehingga pihak manajemen dapat melakukan langkah pencegahan akan terjadinya kecurangan terkhusus pada kecurangan laporan keuangan.